

Dinkes Kalsel Fokus Penanganan 4 Kabupaten sebagai Lokus Stunting



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/485651/dinkes-kalsel-fokus-penanganan-4-kabupaten-sebagai-lokus-stunting>

Kalimantan Selatan sempat menjadi sorotan presiden RI Joko Widodo dan masuk dalam 10 provinsi tertinggi kasus stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalsel, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 11 persen.

“Pada 2013 sebesar 44,1 persen, sementara 2018 menjadi 33,1 persen,” sebut Kepala Dinkes Kalsel, HM Muslim melalui Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Didi Ariyadi di ruang kerjanya, Rabu (7/10).

Menindaklanjuti arahan presiden dalam percepatan penurunan angka stunting, Dinkes Kalsel fokus dengan melakukan intervensi.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memaksimalkan program penurunan kasus stunting di daerah. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara program penurunan stunting di 4 lokus (Lokasi Khusus) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Pada tahun ini kita ada 4 lokus kabupaten/kota di Kalsel. Pada lokasi tersebut kita akan lakukan berbagai program untuk penurunan stunting,” ujar Kepala Dinas

Kesehatan Kalsel, Muslim melalui Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kalsel, Didy Ariadi, Banjarmasin, Rabu (7/10/2020).

Adapun 4 daerah yang telah ditunjuk dalam percepatan stunting yaitu HSU, Tanah Bumbu, Tapin dan Tabalong. Hal Ini sudah terealisasi dengan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil di Kabupaten/Kota Lokus.

“Ini sebagai wujud keseriusan Pemprov Kalsel dalam menekan angka stunting dengan memperluas daerah cakupan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu penanganan stunting sendiri tidak bisa diselesaikan hanya tenaga kesehatan, namun diperlukan keterlibatan sektor di luar tenaga kesehatan. “Dalam penanganan stunting ada dua Intervensi Spesifik dan Sensitif,” katanya.

Menurut Didy, Intervensi Spesifik ditujukan kepada anak dalam seribu hari pertama kehidupan (HPK). Kontribusinya sebesar 30 persen dalam penurunan kasus stunting. “Maka dilakukan perbaikan dan pencegahan gizi buruk, program imuniasi, kesehatan ibu dan anak,” jelasnya.

Sedangkan, Intervensi Sensitif melibatkan sektor lain dalam kegiatan pembangunan. Misalnya program sanitasi oleh Dinas PUPR, Dinas PMD melalui dana desa, hingga sinergitas kader-kader PKK dan Posyandu. “Kami harap dengan konvergensi ini, percepatan stunting bisa dilakukan,” bebernya.

Sedangkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalsel, prevalensi stunting Kalsel mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 44,1 persen. Tahun 2018 menjadi 33,1 persen. Setelah dilakukan studi badan litbang 31,75 persen sebenarnya ada penurunan jika dibandingkan tahun 2014-2018 turun sebesar 11,5 persen atau rata-rata 2 persen.

Sumber berita:

1. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/485651/dinkes-kalsel-fokus-penanganan-4-kabupaten-sebagai-lokus-stunting>, 8 Okt 2021.
2. <https://apahabar.com/2020/10/semptat-disorot-presiden-jokowi-dinkes-kalsel-upayakan-percepatan-penurunan-stunting/>, 7 Okt 2021.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penuruan Stunting
 - a) Pasal 2

Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupanberkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

b) Pasal 27

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.